

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan penulis atas pelaksanaan anggaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar selama pandemi COVID-19 pada tahun 2021, penulis menarik simpulan sebagai berikut.

1. Cabdin Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan wewenang kepada PPK untuk melaksanakan tindakan yang terkait dengan pengeluaran atas anggaran belanja negara. Selama masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021, sesuai dengan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 atas adanya kondisi yang mendesak dan tidak dapat ditunda atas beban belanja yang tidak tersedia atau tidak cukup anggarannya, KPA dapat mengkonfirmasi penyediaan dana melalui revisi DIPA dan dilakukan dengan melalui pembuatan komitmen.
2. Jumlah keseluruhan pagu anggaran belanja untuk Cabdin Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 18.387.992.000,00. Selama tahun anggaran 2021, Cabdin Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar menyerap anggaran belanja sebesar 46,64% atau Rp 8.541.789.547,00. Penyerapan anggaran belanja pada triwulan 1 rendah lalu akan meningkat pada triwulan 2 dan triwulan 3 sedangkan pada triwulan 4 akan

menurun kembali. Hal ini dikarenakan oleh keterlambatan dalam pencairan dana atas anggaran yang telah dialokasikan. Kemampuan penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 terbilang cukup rendah karena tidak mencapai 50% dari total pagu anggaran. Penyebab hal ini dikarenakan oleh adanya Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi COVID-19. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh banyaknya kegiatan yang telah direncanakan harus ditunda dan ditiadakan dalam rangka pmenangani dan menghindari dampak pandemi COVID-19.

3. Risiko yang dapat menghambat pelaksanaan anggaran di Cabdin Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar adalah peraturan atau kebijakan baru yang berubah-ubah terkait dengan PPKM yang mengakibatkan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terselenggarakan dengan baik. Risiko lainnya adalah adanya pengurangan anggaran dari pemerintah akibat adanya *refocusing* anggaran. Atas risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi risiko dengan merencanakan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan agar tujuan dari kegiatan tetap dapat tercapai. Sedangkan atas anggaran yang berkurang dapat disesuaikan lagi pengalokasiannya dengan tidak melaksanakan belanja yang kurang prioritas.